

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Simpulan

Kebijakan vaksinasi covid-19 dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kebijakan tersebut diatur dalam PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 terkait dengan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, bahwa kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibantu dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta masih berusaha untuk memenuhi target vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta melalui strategi yang sudah dibentuk dan di implementasikan. Peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dari indikator *content of policy*, *cotext of implementation*, strategi defensif, dan strategi ofensif.

Dilihat dari indikator *content of policy*, beberapa indikator sudah tecermin dalam implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta. Kebijakan tersebut berisikan kepentingan dari kelompok sasaran yaitu masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari pandemi Coronavirus disease 2019. Selain itu kebijakan tersebut juga memberikan keuntungan sebagai pembangunan citra yang baik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan vaksinasi covid-19 untuk memulihkan kondisi kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta. Kebijakan vaksinasi covid-19 dinilai memiliki manfaat berkelanjutan untuk masyarakat DKI Jakarta, diketahui sebelum terbentuk kebijakan vaksinasi covid-19 masyarakat hanya bergantung terhadap protokol kesehatan untuk melindungi diri masing masing dari paparan virus covid-19, hal ini dapat dinilai bahwa dengan adanya kebijakan vaksinasi covid-19 dapat memberikan kekebalan tubuh yang lebih baik bagi masing-masing individu dan dengan adanya kebijakan vaksinasi covid-19 dapat mencapai tujuan *herd immunity* di DKI Jakarta.

Kebijakan covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta memberikan citra yang baik sebagai implementor, dalam menjalankan tugasnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta dibantu dengan konsep kolaborasi yang dibuka oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan juga menerapkan public private partnership, dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjalankan kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta. Dalam menjalankan kebijakan vaksinasi covid-19 DKI Jakarta memiliki sebuah sumber daya manusia dan dana anggaran yang tinggi sehingga tidak memuat suatu kesulitan dalam memberikan pelayanan vaksinasi covid-19 kepada warganya.

Selain itu dalam indikator *context of policy*, aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dalam kebijakan vaksinasi covid-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah menjalankan tugas pokoknya dengan baik sebagai aktor yang terlibat secara langsung terhadap vaksinasi covid-19. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta memiliki komunikasi yang baik dengan memberikan informasi kepada Gubernur DKI Jakarta terkait dengan hasil yang terjadi di lapangan dan memberikan pelayanan yang sudah cukup baik untuk masyarakat DKI Jakarta dalam program vaksinasi covid-19.

Aktor yang terlibat memiliki strategi untuk mencapai sebuah kepentingan, salah satunya berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan vaksinasi Gotong Royong yang mengambil sebuah keuntungan dari sebuah masalah, hal ini dinilai bahwa pemerintah memanipulasi terminologi *herd immunity* dari kepentingan politik vaksin. Selain itu kepentingan partai politik dan polarisasi di Jakarta dapat disampingkan sementara untuk tidak mengaitkan vaksinasi covid-19 terhadap kepentingan politik elektoral. Lalu isu kehalalan vaksin yang terjadi di DKI Jakarta diwarnai oleh oknum PA 212 yang memiliki riwayat sebagai pendukung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hambatan yang sebelumnya terjadi didukung oleh beberapa faktor yang berbeda beda, yaitu:

- a) Di Jakarta, kecemasan warga DKI memuncak ketika banyaknya media berita online yang mengunggah efek-efek samping setelah melakukan vaksinasi covid-19, biasanya berita tersebut dibuatnya terkesan berlebihan dengan mengungkapkan hal-hal yang mengerikan seperti demam berlebihan bahkan sampai ada berita meninggal dunia, yang dimana belum tentu berita tersebut benar adanya
- b) Keraguan masyarakat berasal dari penolakan vaksin dari tokoh masyarakat, penolakan vaksin di media sosial, keraguan terhadap kehalalan vaksin, dan keraguan bagi individu yang belum pernah menerima vaksin sebelumnya. Dalam hal ini kedudukan media berperan cukup besar, apa yang masyarakat konsumsi dari media berdampak pada keyakinan warga DKI Jakarta untuk menerima program vaksinasi covid-19. Apabila yang disebarluaskan dalam media adalah hal positif, maka akan berdampak positif juga terhadap masyarakat yang melihat, jika berita yang disebarluaskan adalah berita negatif maka akan berdampak negatif.
- c) Ketidaktahuan karna minim informasi warga DKI Jakarta terkait dengan program pemerintah terkait vaksinasi covid-19 dan ketidaksediaan masyarakat untuk membayar vaksin dalam konteks politik vaksin (vaksinasi gotong royong)

Selanjutnya dalam indikator strategi ofensif, dalam penanganannya Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerapkan strategi ofensif dalam upaya menuju endemi covid-19, dan peneliti setuju dengan strategi ini dalam mewujudkan *herd immunity* yang semakin meningkat dan membaik, strategi ofensif yang dimaksud adalah sebuah upaya melalui strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyasar masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi covid-19 dan memiliki target sasaran sehingga dengan adanya kebijakan yang dibentuk dapat mengubah suatu masalah menjadi lebih baik.

Lalu seperti yang sudah diketahui DKI Jakarta merupakan provinsi yang tinggi terhadap penolakan vaksinasi covid-19. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan strategi defensif melalui strategi mempertahankan pasar bertujuan untuk mempertahankan masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi covid-19 dan tetap terus melakukan edukasi seperti melalui bantuan dari health influencer,

tokoh agama, dan pemerintah. Hal ini dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mencoba mempertahankan masyarakat yang sudah percaya terhadap vaksin covid-19 dan telah melakukan vaksinasi covid-19 dari awal untuk mengikuti jumlah dosis vaksin covid-19 yang sudah ditentukan.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menerapkan strategi bumi hangus dalam ofensif, dimana strategi ini menerapkan bagaimana cara mengakhiri masalah secara tuntas tanpa pengecualian. Dalam konteks kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta, menurut peneliti hal tersebut cocok digunakan untuk mengakhiri masalah yang ada dalam kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta pada tahun 2021, menuntaskan masalah dengan penanganan yang tepat hingga masalah yang ada dapat terselesaikan dan kebijakan vaksinasi covid-19 dapat mencapai tujuannya yaitu tingkat *herd immunity* di DKI Jakarta tinggi.

Selain itu, pada defensif Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerapkan strategi pengkuan, dimana strategi ini menerapkan mengakhiri sebuah argumen atau masalah yang terus berlangsung dan memiliki tujuan mendapatkan simpati dari publik. Melalui hal ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam konteks kebijakan vaksinasi covid-19 mengakhiri sebuah argumen atau masalah dengan memberikan informasi yang valid dan terpercaya, sehingga dengan hal itu akan menimbulkan rasa simpati dari masyarakat DKI Jakarta dan akan membuat masyarakat masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dari dosis awal akan terus mengikuti hingga vaksinasi dosis akhir.

Pada akhirnya kebijakan vaksinasi covid-19 sudah membantu memberikan manfaat kepada masyarakat DKI Jakarta walaupun kebijakan vaksinasi covid-19 diwarnai dengan politik vaksin dan beberapa penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Kebijakan vaksinasi covid-19 terbukti memberikan dampak positif pada kelompok sasaran dan kepentingan bersama.

Bawasanya vaksinasi covid-19 memberikan perlindungan terhadap masing masing individu dari penularan virus corona yang cepat, artinya hal ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi covid-19 secara teratur. Kehadiran kebijakan vaksinasi covid-19 yang terus berjalan dengan baik di DKI Jakarta dalam hal ini dapat memberikan kondisi penurunan angka kasus covid-19 yang ada.

## V.2 Saran

Sebagai penulis “Strategi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021” tentang bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta melalui strategi yang telah dibentuk oleh implementor dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 untuk itu dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 sejauh ini baik dan tepat sasaran, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Maka dari itu sangat penting untuk tetap meningkatkan implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 sebagai salah satu program penting dalam masa pandemi covid-19. Peneliti dapat memberikan sejumlah saran untuk pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Jakarta.

### V.2.1 Saran Praktis

- 1) Pihak pelaksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai pelaksana untuk lebih memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif lagi terutama kepada masyarakat yang tidak percaya terhadap vaksin covid-19, memberikan sosialisasi dari pintu ke pintu untuk edukasi dengan memberikan data bahwa vaksin covid-19 tidak memiliki efek samping, halal, dan aman dan memberikan pelayanan mudah dengan membuat program vaksinasi covid-19 pintu ke pintu.
- 2) Dinas Kesehatan DKI Jakarta bisa melakukan sosialisasi dengan mengajak tokoh masyarakat yang menjadi kepercayaan bagi masyarakat daerah tertentu di DKI Jakarta.
- 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan sosialisasi di sosial media untuk sosialisasi terkait dengan menghilangkan polarisasi yang ada di daerah DKI Jakarta.
- 4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat memperluas wilayah vaksinasi covid-19 dan menambah sentra vaksinasi covid-19 di tempat umum yang memiliki potensi ramai seperti mall, taman, dan pasar yang menjadi potensi masyarakat banyak kunjungi.

### V.2.2 Saran Teoritis

- 1) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar memperluas wilayah penelitian, menambah faktor latar belakang (*background factor*) yang lebih jelas.
- 2) Peneliti berharap adanya penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi covid-19 dengan melakukan penelitian kepada masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi covid-19 melalui wawancara yang lebih mendalam dengan narasumber yang lebih banyak dan hasil yang lebih memuaskan.
- 3) Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat mengkaji lebih dalam dan memulai dari awal bagaimana perjalanan awal covid-19 masuk ke indonesia dan memberikan penjelasan terkait vaksin covid-19 lebih mendalam.